

BAB V

KESIMPULAN

Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh siswa-siswa STOVIA pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo didorong oleh pemikiran dr. Wahidin perihal pemberian beasiswa kepada anak-anak Jawa yang berpotensi. Berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama di Indonesia didasarkan dari keberadaan golongan priyayi profesional yang merupakan elit modern di Indonesia. Keberadaan golongan priyayi profesional di dalam struktur masyarakat Jawa merupakan hasil dari proses defeodalisasi yang sudah berlangsung sejak awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Defeodalisasi dalam struktur masyarakat Jawa selama abad 19 hingga awal abad 20 memunculkan dua golongan priyayi. Di satu sisi terdapat golongan priyayi birokrat yang merupakan orang-orang lama yang berasal dari golongan bangsawan/aristokrat Jawa dan menduduki jabatan dalam pemerintahan Hindia-Belanda, serta menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Jawa, berkepribadian moderat, tidak radikal, lebih suka kestabilan daripada dinamika yang membawa kelabilan. Di sisi lain adalah golongan priyayi profesional yang merupakan orang-orang Jawa yang menduduki jabatan dalam hierarki pemerintah Hindia Belanda pada periode awal abad-20 karena dasar pendidikan serta keahlian yang dimiliki baik didalam ataupun diluar dari jabatan pangreh praja. Priyayi profesional jugalah yang menjelma sebagai

wiraswastawan politik di masa pergerakan nasional. Mereka menjadi pendukung ideologi baru, nasionalisme dan menjadi protagonis perjuangan nasional serta bersifat radikal dan revolusioner yang bertentangan dengan etos priyayi. Kedua golongan ini nantinya berpengaruh besar dalam kiprah Budi Utomo dari tahun 1908-1920. Sikap mereka yang konsisten serta kolektif mampu menggerakkan organisasi Budi Utomo mulai dari periode berhubungan baik dengan pemerintah Hindia Belanda, hingga ke masa radikal terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Perkembangan Budi Utomo dalam proses menuju radikalisme politik dapat dilihat dalam tiga periode. Periode pertama yaitu periode kelahiran dan kemandekan organisasi (1908-1912), periode kedua yaitu kebangkitan organisasi dan menuju kiprah politik (1912-1918) dan terakhir periode radikalisme politik (1918-1920). Pertama adalah periode kelahiran dan kebimbangan organisasi. Periode ini ditandai dengan kelahiran Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo lahir dengan membawa semangat serta harapan dari dr. Wahidin dan siswa-siswa STOVIA untuk menjadi organisasi yang membangun kepedulian di bidang pendidikan bagi orang-orang Jawa. Demi mencapai hal tersebut, di masa-masa pendiriannya Budi Utomo menjalin kerja sama dengan para bupati agar organisasi ini mendapat perlindungan dari pemerintah dan bisa terus berkembang demi mencapai tujuan organisasi.

Semangat yang muncul di awal-awal organisasi nyatanya mulai meredup di masa kepemimpinan Tirtokoesoemo (1908-1912). Dibawah kepemimpinannya terjadi konflik antara dr. Cipto dan Soerjodipoetro yang menjabat sebagai komisaris

pengurus Budi Utomo dengan anggota pengurus Budi Utomo lainnya, perihal anggaran dasar Budi Utomo. Konflik tersebut merupakan permulaan dari terbentuknya dua kelompok pandangan dalam organisasi Budi Utomo yang merupakan representasi dari keberadaan golongan priyayi birokrat dan priyayi profesional. Berbarengan dengan konflik yang terjadi, pamor Budi Utomo di masyarakat mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan dua hal yaitu kemunculan organisasi yang bercorak agama seperti Sarekat Islam, ataupun yang bercorak politik seperti Indische Partij, serta tujuan dari organisasi Budi Utomo yang dianggap terlalu sempit dan terkesan eksklusif hanya untuk kalangan tertentu. Atas dasar itulah nantinya pada tanggal 25 Agustus tahun 1912 terjadi pergantian ketua Budi Utomo. Budi Utomo yang sebelumnya diketuai oleh Tirtokoesoemo, kini berpindah kepemimpinan dibawah Pangeran Ario Noto Dirodjo demi mengatasi kemandekan organisasi.

Kedua adalah periode kebangkitan organisasi dan menuju kiprah politik. Periode ini ditandai dengan dipimpinnya Budi Utomo oleh kalangan istana yaitu Pangeran Ario Noto Dirodjo (1912-1914) yang berasal dari Pakualaman, Yogyakarta. Dibawah kepemimpinannya ia berupaya meningkatkan semangat kegiatan organisasi yang redup selama tiga tahun terakhir. Salah satu hal yang membuat semangat organisasi meningkat dibawah kepemimpinan Pangeran Ario Noto Dirodjo adalah menjamnya konflik antara para bupati dengan golongan priyayi profesional di dalam Budi Utomo. Konflik tersebut tercermin dalam pemberitaan di surat kabar Budi

Utomo tanggal 1 Maret 1913 yang isinya menyerang kedudukan para bupati karena sudah tidak mau membantu Budi Utomo seperti ketika masa-masa awal Budi Utomo berdiri. Adanya sentimen antara kalangan istana (khususnya Pakualaman) sebagai pewaris Mataram Islam melawan para bupati yang merupakan bekas bawahan Mataram Islam menjadi alasan kuat mengapa konflik antara dua golongan tersebut menajam. Pada akhirnya kalangan istana berhasil “mengusir” para bupati dari kedudukan di organisasi dan membuat arah organisasi Budi Utomo semakin progresif akibat berkuasanya golongan priyayi profesional. Kini Budi Utomo memasuki minat baru dalam berkegiatan organisasi yaitu bidang politik.

Masuknya Budi Utomo ke ranah politik dimulai ketika Budi Utomo ikut terlibat dalam kampanye milisi pribumi yang berkembang di Hindia Belanda pada periode awal Perang Dunia Satu (1914-1918). Demi menggerakkan isu kampanye milisi pribumi, pengurus pusat Budi Utomo mengambil langkah yaitu mengutus dua orang anggotanya yaitu Dwidjosewojo dan Sastrowidjono untuk melakukan perjalanan ke seluruh Jawa dalam rangka berkampanye mendukung rencana pembentukan milisi pribumi. Kampanye yang dilakukan oleh Dwidjosewojo dan Sastrowidjono mendapat berbagai respon dari masyarakat serta organisasi-organisasi di Hindia Belanda, ada yang setuju, ada juga yang tidak. Momen terpenting dari kampanye milisi pribumi adalah ketika sidang Budi Utomo tanggal 5-6 Agustus 1915 di Bandung. Mas Soetedjo bersama enam anggota lainnya mengemukakan petisi kepada pemerintah Hindia-Belanda yang berisi tuntutan agar sistem parlementer

diwujudkan baik sebagai imbalan atau sebelum diberlakukannya sistem milisi. Pasca peristiwa yang dikenal sebagai petisi Bandung tersebut, isu terkait pembentukan dewan parlementer berhasil bersanding bersamaan dengan isu milisi pribumi. Petisi Bandung juga menjadi pijakan pertama dari Budi Utomo untuk masuk ke ranah politik di masa pergerakan nasional.

Upaya untuk menggalakan kampanye milisi pribumi serta pembentukan Volksraad direspon pemerintah Hindia Belanda dengan membentuk *Comité Indië Weerbaar* pada bulan Juli 1916. Dalam menjalankan tugasnya, komite tersebut ternyata gagal membuat resolusi terkait pembentukan milisi pribumi disetujui oleh *Staatengeneraal*. Sedangkan undang-undang terkait pembentukan parlemen di Hindia Belanda malah disetujui oleh *Staatengeneraal* tanggal 11 Desember 1916. Usulan terkait pembentukan parlemen di Hindia-Belanda segera disetujui oleh Menteri Daerah Jajahan yaitu Pleyte melalui undang-undang bulan Desember 1916 dan dinamakan *Volksraad* (Dewan Rakyat). Capaian ini merupakan keberhasilan yang membanggakan untuk Budi Utomo sebagai anggota dari *Comité Indië Weerbaar*, seakan-akan Budi Utomo menjadi pahlawan yang berhasil mewujudkan impian terbentuknya parlemen di Hindia Belanda. Kini Budi Utomo bersiap menyambut terbentuknya Volksraad sebagai arena politik baru bagi Budi Utomo.

Terakhir adalah periode radikalisme politik Budi Utomo. Budi Utomo yang sebelumnya dikenal sebagai organisasi yang bersikap terhadap pemerintah, kini telah berubah menjadi radikal pada pemerintah. Terdapat empat faktor mengapa Budi

Utomo mengalami perubahan sikap menjadi radikal. Keempat faktor tersebut antara lain : Sikap reaktif Budi Utomo terhadap kebijakan politik kolonial yang semakin bertentangan dengan politik etis, fokus organisasi yang berupaya untuk mencari massa justru membuat unsur yang lebih radikal di dalam Budi Utomo mendapat pengaruh yang lebih besar, pergeseran kepemimpinan Budi Utomo dari kalangan istana Pakualaman (Yogyakarta) ke Kasunanan (Surakarta) dan yang terakhir kedekatan ideologi salah satu pimpinan Budi Utomo yaitu Dwidjosewodjo dengan tokoh-tokoh sosialis Belanda.

Radikalisme politik yang dianut oleh Budi Utomo nantinya akan berkuat pada arena Volksraad khususnya ketika bergabung ke dalam gerakan *Radicale Concentratie* pada bulan November 1918. *Radicale Concentratie* merupakan suatu gerakan politik karena konsentrasi ini berkuat di dalam Volksraad sebagai suatu institusi politik milik pemerintah Hindia Belanda. Melalui *Radicale Concentratie* di Volksraad, Budi Utomo menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang tidak berpihak pada masyarakat pribumi. Alasan mengapa Budi Utomo terlibat dalam gerakan ini yaitu : Keberadaan partai ISDP yang tidak serevolusioner ISDV sebagai partai pengusung gerakan *Radicale Concentratie* ditambah kedekatan Dwidjosewojo dengan tokoh-tokoh SDAP di Belanda yang merupakan kepanjangan tangan dari ISDP di Hindia Belanda ketika bertugas dalam *Comité Indië Weerbaar*, serta sifat gerakan *Radicale Concentratie*

yang reformatif memiliki kesamaan nilai dengan etika Jawa yang dianut oleh para wakil Budi Utomo di Volksraad.

Perjuangan Budi Utomo didalam *Radicale Concentratie* dilakukan demi mendesak pemerintah untuk membentuk suatu parlemen yang dipilih rakyat dengan hak penuh untuk merancang, mengeluarkan hukum serta peraturan-peraturan. Merespon keberadaan gerakan *Radicale Concentratie*, Van Limburg Stirum mengagagas pembentukan komisi yang akan memberi nasihat perihal pembaruan dasar-dasar kenegaraan Hindia Belanda. Komisi tersebut bernama *Commissie tot Herziening van de Grondslagen der Staatsinrichting van Nederndsch-Indie* dan dibentuk tanggal 28 Desember 1918. Pemerintah yang merespon dengan tepat tuntutan dari gerakan *Radicale Concentratie* membuat gerakan ini mengalami perubahan fokus gerakan. Gerakan *Radicale Concentratie* kini dialihkan dalam rangka menjaga serta mengawasi berbagai kebijakan pemerintah yang menindas rakyat/bertentangan dengan politik etis.

Budi Utomo yang terlibat di dalam konsentrasi tersebut ikut andil juga dalam menjaga dan mengawasi berbagai kebijakan pemerintah melalui keterlibatan dalam mosi-mosi di Volksraad. Salah satu capaian terbesar Budi Utomo ketika bergabung ke dalam *Radicale Concentratie* adalah ketika terlibat dalam mosi Cramer yaitu mosi mengenai masalah kekurangan pangan di Hindia Belanda. Meski pada akhirnya mosi ini gagal karena kalah dalam pemilihan suara di Volksraad, dampak yang diakibatkan dari mosi ini sangatlah besar. Pemberontakan serta pemogokan petani terjadi setelah

mosi Cramer selama kurun waktu bulan Juni 1919 hingga Juli 1919. Peristiwa di Polanharjo, Toli-toli dan Garut menjadi bukti bahwa gerakan *Radical Concentratie* mampu menjadi pemicu tidak langsung dari gerakan-gerakan sosial di kalangan masyarakat pribumi. Budi Utomo pun mencapai masa dimana keberadaan organisasi dianggap bertentangan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Keberlangsungan Budi Utomo dengan *Radical Concentratie* pada akhirnya tidaklah berlangsung lama. Budi Utomo memutuskan keluar dari *Radical Concentratie* tahun 1920 dan memutuskan untuk kembali berhubungan baik terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sayangnya radikalisme politik yang dialami oleh Budi Utomo memberikan dampak yang mengejutkan di bidang sosial-politik organisasi. Budi Utomo tetap dianggap sebagai organisasi yang radikal oleh pemerintah akibat keterlibatan Budi Utomo dalam pemogokan-pemogokan di Hindia Belanda, bergabung ke dalam *Radical Concentratie* tahun 1922 serta kritik-kritik yang disuarakan organisasi terhadap pemerintah Hindia Belanda. Disisi lain Budi Utomo ternyata gagal menaikkan pamornya di mata masyarakat dan malah mengalami kemunduran organisasi hingga nantinya Budi Utomo melakukan fusi dengan organisasi lain menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra).

Dinamika organisasi yang tercipta antara anggota yang berasal dari golongan priyayi birokrat dengan golongan priyayi profesional menonjolkan ciri khusus perkembangan Budi Utomo dibanding organisasi lain di masa pergerakan nasional. Ketika organisasi lain banyak mengalami dinamika organisasi akibat keberadaan

golongan priyayi profesional yang berbeda ideologi satu sama lain, Budi Utomo justru mengalami dinamika akibat keberadaan dua golongan priyayi yang saling berlawanan satu dengan yang lain. Kedua golongan tersebut berhasil membawa Budi Utomo mengalami masa-masa moderat serta radikal dengan pemerintah Hindia Belanda. Melihat dari perjalanan Budi Utomo selama tiga periode tersebut, Budi Utomo semestinya tidak hanya dianggap sebagai organisasi yang berhubungan baik terhadap pemerintah Hindia Belanda, tapi juga harus dilihat bahwa Budi Utomo pernah mengalami masa dimana ia berlawanan dengan pemerintah demi memperjuangkan nasib rakyat pribumi di Hindia Belanda.